

ANALISIS KINERJA FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANYUWANGI

Tanto Sulistriyono, Siti Komariyah¹, Zainuri
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

The purpose of this study were to describe the fiscal performance in Banyuwangi and to determine the influence of the allocation of direct expenditure, and the village fund allocation in the region to economic growth in Banyuwangi. This type of research was explanatory research. Secondary data used in this study comes from the agencies concerned, including the Central Bureau of Statistics Provincial and District/Municipality, Department of Education, Bapeda and other related agencies. Analysis of the data used was descriptive-quantitative. Methods of data analysis used Ordinary Least Square. This research showed that fiscal performance in Banyuwangi showed that the largest revenue contributor in Banyuwangi district budget revenue structure over the last 5 years one source of post equalization funds. The proportion of local revenue Banyuwangi propped by the balance funds. Based on the test results indicate that the village fund allocation significantly to economic growth. Other variable direct expenditure, the ratio of labor did not prove significantly to economic growth.

Keywords: *Fiscal performance, the village fund allocation in the region and economic growth*

1. Pendahuluan

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu diatas rata-rata target pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya di tahun 2011-2012, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mampu tumbuh di atas 7 persen. Namun mengalami fluktuasi di tahun 2013 menjadi 6,76 persen (Banyuwangikab, 2014). Pada awalnya sektor primer merupakan sektor ekonomi paling dominan berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Dominannya sektor primer juga tidak kalah pentingnya dengan di dukung kondisi karakteristik wilayahnya, dimana sektor primer tersebut didukung oleh sub sektor pertanian, sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan (Fabiomarta, 2004; Capra, 2000). Ketersedian luas daerah terbesar dibandingkan kabupaten/ kota lain di Provinsi

¹ **Author Correspondent**

Jawa Timur merupakan peluang besar yang menjadikannya sektor primer sebagai salah satu sektor utama pembentuk struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Adanya dua instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara/anggaran yang ingin dicapai. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan

Setelah mengetahui kontribusi penerimaan daerah di Kabupaten Banyuwangi, perlu dipertimbangkan belanja –belanja pemerintah daerah. Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja tersebut, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelolaan keuangan yang baik di daerah Nursyawalina (2005). Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Sektor prioritas wajib kabupaten Banyuwangi yakni sektor pendidikan dan sektor kesehatan merupakan termasuk kedalam alokasi anggaran yang bersifat langsung. Anggaran sektor pendidikan berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan pendidikan. Sejalan dengan sektor pendidikan, alokasi anggaran untuk kesehatan juga akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan desentralisasi dan kinerja fiskal di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui pengaruh kinerja fiskal yang diukur dengan alokasi belanja langsung dan alokasi dana desa di wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel bebas meliputi pengaruh belanja modal, efektivitas, efisiensi manajemen dan kemandirian keuangan daerah terhadap variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi (Sugiyono, 2008:56). Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel bebas meliputi pengaruh alokasi belanja langsung dan alokasi dana desa di wilayah terhadap variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber: (a) Data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga

Konstan, diperoleh dari Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (BPS), Potensi Daerah Kabupaten Banyuwangi (Bappeda). (b) Data Realisasi APBD dan Target APBD, diperoleh dari Indikator Ekonomi Kabupaten Banyuwangi (BPS), Kabupaten Banyuwangi. (c) Data Pengeluaran Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah, diperoleh dari Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka (BPS), Indikator Ekonomi Kabupaten Banyuwangi (BPS).

Metode analisis data yang digunakan Analisis Regresi Dinamik dengan *Ordinary Least Square* (OLS). Pada prinsipnya model-model terdistribusi seperti pada persamaan dapat diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) karena jika diasumsikan nonstokastik, atau tetap dalam pengambilan sampel berulang, maka begitu pula dan semua nilai terlambat X lainnya. Oleh sebab itu, pada persamaan dengan sendirinya tidak melanggar asumsi standar model regresi linear klasik apapun.

3. Hasil Penelitian

3.1 Deskripsi Kinerja dan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi

Kondisi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dijelaskan dengan menggunakan data realisasi APBD dari tahun 2009–2014. Komposisi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dilihat dari proporsinya, perkembangan masing-masing komponen pendapatan daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang relatif stabil

Peningkatan pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan realisasinya melampaui proyeksi yang ditargetkan dalam APBD. Kenaikan pendapatan Kabupaten Banyuwangi berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari tahun ke tahun. Kecenderungan kenaikan pendapatan daerah ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bondowoso, sebagai daerah terdekat Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 sebesar Rp.1,14 triliun; pada tahun 2010 sebesar Rp.1,20 triliun; dan pada tahun 2011 naik menjadi Rp.1,45 triliun. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 merupakan pendapatan terbesar selama periode 2009-2014 yakni sebesar Rp 1,69 triliun dan Rp 1,91 triliun.

Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir salah satu bersumber dari pos dana perimbangan. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten/ kota lain yang pendapatannya ditopang hampir 80% bersumber dari dana perimbangan. Kabupaten Banyuwangi, dana perimbangan selalu mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Pada tahun 2009, pertumbuhan dana perimbangan mencapai 80,19%, pada tahun 2010 terjadi penurunan yakni sebesar 3,34 % dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, proporsi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi tertopang oleh dana perimbangan sekitar kurang lebih 80%. Dana perimbangan pada tahun 2011 sebesar 67,71%, pada tahun 2012 dana

perimbangan masih menjadi penopang terbesar pendapatan daerah sebesar 70,90%. Sedangkan pada tahun 2014, dana perimbangan mengalami sedikit penurunan sebesar 57,36% dari pendapatan daerah dan merupakan dana perimbangan terkecil selama tahun 2009 -2014.

Kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi belum maksimal. Prosentase dari pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 7,60 hingga 7,50 % dari total pendapat daerah. Pada tahun 2009 dan 2010 pendapatan daerah dari 86,97 miliar rupiah menjadi sebesar 90,66 miliar rupiah. Namun demikian, pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi masih lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2011 dan 2012,. pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi masing-masing sekitar Rp 113,36 miliar dan Rp. 139,51 miliar. Dilihat dari komponen pembentuk PAD di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat diketahui bahwa komponen terbesar penyumbang PAD berbeda-beda dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 lain-lain PAD yang sah berkontribusi terbesar dalam pembentukan PAD, sedangkan pada tahun 2009 retribusi daerah menyumbang proporsi terbesar dalam PAD. Di sisi lain kontribusi pajak daerah cenderung mengalami peningkatan meskipun peningkatannya relatif kecil tiap tahunnya. Pada tahun 2009, sumbangan pajak daerah terhadap PAD sebesar Rp 21,48 miliar. Namun pada tahun 2014, realisasi pajak daerah sebesar Rp 94,19 miliar Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah belum digali secara optimal melalui langkah ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Komponen belanja tidak langsung Kabupaten Banyuwangi terdiri dari belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Komponen tidak langsung terbesar adalah belanja hibah dari tahun ketahun. Pada tahun 2009 sebesar Rp 59,69 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 90,86 miliar pada tahun 2010. Namun kondisi tersebut mengalami fluktuasi pada taun 2010 hingga tahun 2014. Hal ini mengindikasikan belanja tidak langsung tidak hanya untuk belanja hibah, tetapi untuk komponen lainnya seperti belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan sebagainya.

Dalam komponen belanja langsung di atas, menunjukkan bahwa komponen belanja memiliki proporsi terbesar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja berkaitan dengan investasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Proporsi Belanja pada tahun 2009 sebesar 36,00% dari total belanja langsung, menurun menjadi 27,15% pada tahun 2011. Komponen selanjutnya adalah belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Komponen belanja barang dan jasa merupakan komponen terkecil yang berkontribusi terhadap belanja langsung, dimana pada tahun 2009 proporsinya sebesar 10,70% meningkat sebesar 18,37% pada tahun 2014, namun dari kontribusi tiap tahunnya, kontribusi belanja barang dan jasa merupakan belanja terkecil dalam belanja langsung Kabupaten Banyuwangi.

Rasio PAD/TPD mengalami peningkatan dari tahun 2009-2014. Hal tersebut menandakan derajat desentralisasi fiskal di lihat dari rasio PAD terhadap TPD semakin rendah pada tahun 2014 karena rata-rata tingkat DDF berada di atas 10% per tahun.

Rasio BHPB terhadap TPD mengalami penurunan dari tahun 2009-2014. Hal tersebut menandakan derajat desentralisasi fiskal di lihat dari rasio Rasio BHPB terhadap TPD semakin rendah pada tahun 2014.

Sumbangan Daerah dengan TPD selama tahun 2009-2014 sebesar 0%. Hal itu menandakan ketergantungan daerah terhadap keuangan pusat dana sekali nol dengan kata lain adanya kemandirian dalam keuangan daerah.

3.2 Hasil Analisis Ordinary Least Square (OLS)

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai koefisien-koefisien regresi tersebut adalah metode kuadrat terkecil (*dit* /OLS). Bentuk model dalam penelitian ini adalah bentuk linier. Analisis regresi dilakukan dengan metode OLS. Persamaan yang diestimasi adalah:

$$PE = 4,927 + 0,063 BLJ + 0,587 DESA$$

Prob. t hitung= (0,002) (0,819) (0,026)

Berdasarkan hasil uji persamaan jangka panjang, diperoleh estimasi data sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 4,927 satuan artinya apabila seluruh variabel independen konstan maka pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang adalah 4,927 satuan.
- b. Koefisien alokasi belanja langsung sebesar 0,063 berarti bahwa setiap kenaikan belanja langsung sebesar Rp 1 maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,063.
- c. Koefisien alokasi dana desa sebesar 0,587 berarti bahwa setiap kenaikan alokasi dana desa sebesar Rp 1 maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,587.

Berdasarkan hasil uji t dijelaskan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi *Adjusted R-squared* adalah 0,567 atau sebesar 56,7%. Artinya, pengaruh antara alokasi dana desa dalam jangka panjang sebesar 56,7%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1 Kinerja Fiskal di Kabupaten Banyuwangi

Kinerja fiskal di Kabupaten Banyuwangi dideskripsikan dengan ukuran pendapatan dan belanja langsung dan tidak langsung. Hasil analisis deskripsi menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan

realisasinya melampaui proyeksi yang ditargetkan dalam APBD. Kecenderungan kenaikan pendapatan daerah ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bondowoso, sebagai daerah terdekat Kabupaten Banyuwangi. Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir salah satu bersumber dari pos dana perimbangan.

Kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi belum maksimal. Hal itu dikarenakan dilihat dari komponen pembentuk PAD di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat diketahui bahwa komponen terbesar penyumbang PAD berbeda-beda dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi dana perimbangan Kabupaten Banyuwangi setiap tahun mengalami fluktuasi. Dana alokasi umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dana alokasi khusus pada lima tahun terakhir menunjukkan persentase yang relatif meningkat. Disisi lain, Kabupaten Banyuwangi tidak mendapat dana perimbangan dari propinsi. Besarnya dana alokasi umum yang cenderung meningkat menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi, dan sumbangan pihak ketiga.

Selama tahun 2009 – 2014 terdapat tiga komponen terbesar lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni dana bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi. Dana penyesuaian dan otonomi khusus mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan lain-lain pendapatan yang sah. Komponen tersebut cenderung mengalami peningkatan proporsi setiap tahunnya. Dominasi belanja langsung dalam komponen belanja di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2009 – 2014. Peningkatan tersebut menjadi besar karena disebabkan karena belanja pegawai yang setiap tahun meningkat.

Komponen belanja tidak langsung Kabupaten Banyuwangi terdiri dari belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Komponen tidak langsung terbesar adalah belanja hibah dari tahun ketahun. Hal ini mengindikasikan belanja tidak langsung tidak hanya untuk belanja hibah, tetapi untuk komponen lainnya seperti diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Belanja langsung memiliki kerkaitan berkaitan dengan investasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Namun dari kontribusi tiap tahunnya, kontribusi belanja barang dan jasa merupakan belanja terkecil dalam belanja langsung Kabupaten Banyuwangi.

Derajat desentralisasi fiskal merupakan tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri. Dari skala interval derajat yang sama mengenai rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

4.2 Pengaruh Alokasi belanja langsung dan Alokasi Dana desa di Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil analisis data tentang alokasi belanja langsung dan alokasi dana desa di wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan Rostow, menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang pada tahap awal pemerintah akan membutuhkan investasi yang besar atau yang lebih dikenal dengan "teori dorongan kuat" (*big push theory*). Hasil penelitian tentang kinerja fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja merupakan kebijakan dalam perekonomian yang perlu dilaksanakan ketika menghadapi masalah pengangguran yang serius. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat pengangguran berbagai jenis faktor produksi. Faktor-faktor produksi menganggur karena kurangnya permintaan efektif dari masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan permintaan efektif, yaitu dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan. Namun ketika permintaan lebih besar dari pada penawaran akan mengakibatkan naiknya harga-harga (inflasi), dan inflasi ditengarai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi belanja langsung tidak akan meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan. Tetapi alokasi belanja langsung yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan yang pada akhirnya tidak akan menambah pendapatan asli daerah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Vegirawaty, (2012) Menurut Permendagri No 13 tahun 2006, Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Negara, dan Belanja Tidak Terduga. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Alokasi belanja langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan alokasi belanja langsung digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja

karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dalam perekonomian suatu negara, belanja pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Dengan demikian apabila anggaran belanja pemerintah gagal direalisasikan maka tidak berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. Dana yang telah tersedia menjadi menganggur (*idle money*), sehingga berbagai infrastruktur yang semestinya terbangun menjadi terhambat perwujudannya.

Kebijakan alokasi belanja langsung merupakan kebijakan dalam perekonomian yang perlu dilaksanakan ketika menghadapi masalah pengangguran yang serius. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat pengangguran berbagai jenis faktor produksi. Faktor-faktor produksi menganggur karena kurangnya permintaan efektif dari masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan permintaan efektif, yaitu dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan. Namun ketika permintaan lebih besar dari pada penawaran akan mengakibatkan naiknya harga-harga (inflasi) dan inflasi ditengarai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Akanni dan Osinowo (2013) dan Easterly dan Rebelo (2013) yang menemukan bahwa alokasi belanja langsung tidak dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

b. Pengaruh Rasio Alokasi Dana Desa Di wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pembangunan yang dilakukan, dititik beratkan pada pembangunan desa. Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang mengenai otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi dana desa di wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan alokasi dana desa diberikan untuk pembangunan fisik tetapi bukan untuk sumber-sumber produktif dalam percepatan pembangunan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan alokasi dana kelurahan ke setiap kelurahan sebagai wujud nyata pemenuhan hak kelurahan dalam membiayai program pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi dana kelurahan tersebut digunakan dalam pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan pengembangan kelurahan. Dalam melakukan pengembangan kelurahan ini ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran yaitu dalam hal ini meliputi tingkat pendapatan serta manfaat alokasi dana kelurahan menurut tanggapan pemimpin kelurahan dan masyarakat kelurahan untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Kinerja fiskal di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir adalah pos dana perimbangan. Proporsi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi tertopang oleh dana perimbangan. Kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi belum maksimal. Selama lima tahun terakhir, terdapat tiga komponen terbesar lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni dana bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi. Dana penyesuaian dan otonomi khusus mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan tersebut menjadi besar disebabkan karena belanja pegawai yang setiap tahun meningkat.
2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi dana desa signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,002 dimana nilai ini kurang dari 5%. Variabel lainnya belanja langsung memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 tidak terbukti signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kemampuan daerah dalam pengembangan perekonomian bukan hanya dari dana dari pemerintah.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap terus melakukan penguatan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, yang mengedepankan insentif bagi investasi lokal seperti yang selama ini dilakukan, sehingga apabila dilihat dari kebijakan fiskalnya akan menciptakan keunggulan komparatif daerah

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor yang mendominasi perekonomian hendaknya ditingkatkan supaya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

2. Dalam rangka menghadapi otonomi daerah khususnya disarankan agar terus memperkuat paradigma berorientasi jangka panjang yaitu peningkatan PAD melalui peningkatan PDRB, bukan melalui perbanyakannya Perda yang sering kontra produktif bagi dunia usaha selain itu, alokasi belanja langsung lebih terarah dalam alokasi anggarannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Akai, Nobuo, Yukihiro Nishimura, Masayo Sakata, 2007. *Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, Economics of Governance*. Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPSTIE YPKN.
- Bafadal, Azhar. 2014. *Analisis Sektor Basis Pertanian Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah*. AGRIPUS Vol 24 No. 2.
- Bahl, Roy W., 2000. *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Barzelay, M. 1991. *Managing Local Development, Lesson from Spain*. Policy Sciences, 24, 271 – 290.
- Bourgeois, R. 2005. *Analytical Hierarchy Process: an Overview*, UNCAPSA-UNESCAP. Bogor.
- Chapra, M. Umer, 2000. *Sistem Moneter Islam*
- Driver C. 1994. *Structural Change in the UK 1974-1984 : an Input-Output Analysis*. *Applied Economics* 26 : 153-158.
- Fafurida et al. 2012. *Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 13 No. 2.
- Fabiomarta, W. 2004. *Tranformasi Struktural Perekonomian Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Tidak Dipublikasikan. Institut Pertanian Bogor.
- Feldman G., D. McClain, K.Palmer. 1987. *Sources of Structural Change in the United States, 1963-1978 : an Input- Output Perspective*. *The Review of Economics and Statistics* 69 (3): 503-510.
- Haukilo, Emanuel. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Hoover, E.M. 1984. *An Introduction to Regional Economics, 2nd ed.* New York: Knopf.
- Korres G.M. 1996. *Sources of Structural Change : an Input-Output Decomposition Analysis for Greece.* Applied Economics Letters 3 : 707- 710.
- Mankiw, N. G. 2006. *Teori Makro Ekonomi Edisi Ke enam.* Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
- Malik, Shahnawaz, dkk, 2006. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan, The Pakistan Development Review, 45: 4 part ii (Winter 2006).*
- Nursyawalina. 2009. *Analisis Pengeluaran Pemerintah terhadap Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Lahat dan Muaraenim.* Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Oates, W, 1993, *Fiscal Decentralization and Economic Development.* National Tax Journal, XLVI. 237-243.
- Resosudarmo, B. P., Hartono, D., Ahmad, T., Subiman, N. I. I., Olivia, Noegroho, A. 2002. *Analisis Penentuan Sektor Prioritas di Kelautan dan Perikanan Indonesia.* Jurnal Pesisir dan Lautan.
- Saaty, Thomas L. 1986. *Decision Making for Leaders The Analytical Hierarchy Process For Decisions in Complex World.* University of Pittsburgh.
- Thiessen, Ulrich, 2003. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries, Fiscal Studies Vol. 24 No. 3.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. *"Pengelolaan Keuangan Daerah"*. Jakarta
- Undang – Undang No. 17 Tahun 2003. *"Keuangan Negara dan Belanja Negara"*. Jakarta: Republik Indonesia